



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Jum'at 31 Januari 2025



RINGKASAN BERITA HARI INI



Segenap Pimpinan dan Anggota
DPRD KABUPATEN SIDOARJO
Mengucapkan

SELAMAT HARI JADI KABUPATEN SIDOARJO

1859 - 2025
Sidoarjo

Sidoarjo Baik, Hebat, dan Bermartabat



H. Abdillah Nashih
Ketua DPRD
Kabupaten Sidoarjo



Suyarno, S.H., M.H.
Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Sidoarjo



H. Kayan, SH
Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Sidoarjo



Warah Andono, SE
Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Sidoarjo

Teken Pakta Integritas, OPD Bakal Rutin Dievaluasi

Plt Bupati: Lebih Solid dan Berikan Pelayanan Terbaik

SIDOARJO - Kinerja organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sidoarjo akan lebih terkontrol. Itu seiring dengan adanya perjanjian kinerja dan pakta integritas.

Kemarin (30/1), kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Sidoarjo diminta menandatangani perjanjian kinerja dan pakta integritas di Pendopo Delta Wibawa. Mereka diminta untuk terus meningkatkan kinerja dalam pemerintahan dan pelayanan publik. Jika kinerja menurun, mereka akan dievaluasi.

Satu per satu kepala OPD tanda tangan dengan disaksikan Plt Bupati Sidoarjo Subandi. "Kami sudah instruksikan ke Sekda untuk terus melakukan monitoring," kata Subandi.

Menurut dia, pada awal 2025 ini harus ada komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja. Setelah menandatangani pakta integritas, tugas-tugas OPD bakal lebih terkontrol. "Dan akan rutin dievaluasi. Tentu ada sanksinya jika tidak memenuhi target," tegas Subandi.

Prinsipnya, lanjut dia, perjanjian kinerja itu untuk membangun kebersamaan dan kesejahteraan di Sidoarjo. Antar OPD agar lebih solid dan memberikan pelayanan terbaik. Evaluasi bakal dilakukan rutin sesuai bidangnya.

Selain perjanjian kinerja, Plt Bupati Sidoarjo Subandi juga memberikan penghargaan Slamet Akas, tabilabii kepada instansi Pemerintah (Skap) dan indeks

Kami sudah instruksikan ke Sekda untuk terus melakukan monitoring."

SUBANDI
Plt bupati Sidoarjo

Pelayanan Publik Kinerja Perangkat Daerah. Penghargaan SAKIP antara lain diberikan kepada RSUD RT Notopuro Sidoarjo dengan predikat AA. Lalu, Kecamatan Jabon dari predikat BB ke A. Kecamatan Sedati dari predikat BB ke A, dan Dinas Komunikasi dan Informatika dari predikat BB ke A. (uzi/fal)

Komisri B DPRD Sidoarjo Angkat Bicara Terkait Sengketa Parkir Yang Bisa Berdampak Pada Sektor PAD



Salah satu komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar sidang pleno pada Selasa (30/1) untuk membahas sengketa parkir yang bisa berdampak pada sektor PAD.

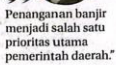
Salah satu komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar sidang pleno pada Selasa (30/1) untuk membahas sengketa parkir yang bisa berdampak pada sektor PAD.

Sekolah Rusak Diidentifikasi dengan Aplikasi

INFRASTRUKTUR bidang pendidikan juga menjadi salah satu prioritas Pemkab Sidoarjo. Ratusan sekolah rusak akan diperbaiki tahun ini.

Kepala Bidang Pendidikan, Pengawasan, Sarana dan Prasarana Dinas Dikbud Sidoarjo Indar Hidayat mengatakan, sebanyak 78 SDN dan 33 SMPN bakal diperbaiki tahun ini. "Ini sudah mulai proses lelang pelaksanaannya," kata Indar.

Selain yang terjadwal tersebut, pihaknya juga menyiapkan anggaran untuk sekolah yang rusak insidental. Misalnya, ketika terdampak puting beliung, banjir, atau roboh mendadak. Sekolah tersebut diperbaiki melalui anggaran belanja tidak terduga (ITT). Termasuk dalam perubahan anggaran keuangan (PAK), pihaknya memastikan akan menambah jumlah

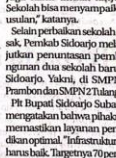


SUBANDI
Plt bupati Sidoarjo

dengan detail titik lokasi dan jenis kerusakan.

Pihaknya akan meninjau dan memastikan mana yang akan diprioritaskan untuk diperbaiki. "Selain lewat aplikasi, surat usulan dari sekolah langsung juga kami tindak lanjut. Sekolah bisa menyampaikan usulan," katanya.

Selain perbaikan sekolah rusak, Pemkab Sidoarjo melanjutkan penuntasan perbaikan rumah yang rusak berat di rumah-rumah warga. Untuk itu, pihaknya memastikan layanan pendidikan di rumah-rumah tersebut berjalan normal. "Infrastrukturnya harus baik. Tanggapan cepat dari sekolah rusak bisa tahun ini," katanya. (uzi/fal)



Monumen 100 Tahun Kemerdekaan

YETISNEN Monumen Jayadewi di Alun Alun Sidoarjo. Merupakan salah satu ikon kota Sidoarjo yang dibangun pada tahun 1966. Saat ini, monumen tersebut sedang direnovasi.



Plt Bupati Sidoarjo Subandi dalam rangka RTLH di rumah warga Kecamatan Sidoarjo

Plt Bupati Tinjau Kondisi Memprihatinkan RTLH Warga

SIDOARJO - Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo, Plt Bupati Sidoarjo Subandi segera memproses bantuan agar segera dilakukan perbaikan.

"Kondisi rumah seperti ini tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Pemerintah daerah bersama Badan asalan terus turun ke lapangan untuk mengidentifikasi rumah-rumah yang tidak layak huni dan memberikan bantuan perbaikan. Ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, terutama untuk warga yang tidak mampu," ujar Subandi.

Ia juga mengungkapkan pentingnya perhatian terhadap kondisi RTLH demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.

"Kami berharap dengan adanya perbaikan RTLH, kualitas hidup warga dapat meningkat, yang pada gilirannya akan menciptakan stabilitas sosial di wilayah ini," ujar Subandi.

Sementara itu, Kepala Desa Jati, Amir Rudin, mengaku yang tinggal bersama anak istrinya, sangat bersyukur. Dimana tanggungan kepala daerah ke rumahnya membuat kabar untuk memberikan bantuan rehab rumahnya. Sudah lama Amir berniat merenovasi rumahnya, namun tidak punya biaya.

"Saya juga mengucapkan terima kasih, karena setelah rumah saya sudah lama hilang, mau gusur tidak ada biaya, ini malah dapat bantuan rehab rumah dari pemerintah. Terima kasih," ucap Amir.

Laut Bukan untuk Segelintir Orang, Privatisasi Diminta Dihentikan

PAKAR Kelautan Universitas Airlangga (Unair) Prof Muhammad Amin Alamsja, menilai tindakan privatisasi dengan membangun pagar laut bisa menciptakan konflik kepentingan di Zona Maritim.

"Indonesia ini memiliki batasan maritim yang diakui secara internasional, mulai dari



Pendemo di depan kantor pertanahan Sidoarjo

GPS Demo soal HGB Pesisir Segorotambak

SIDOARJO - HARIAN BANGSA - Dalam rangka sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat pesisir, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo menggelar demonstrasi penggunaan alat pemetaan berbasis GPS di kawasan HGB (Hak Guna Bangunan) pesisir Segorotambak.

Demonstrasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemetaan wilayah pesisir dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Acara berlangsung di depan kantor pertanahan Sidoarjo, dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanahan, serta masyarakat setempat.

Salah satu narasumber, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo, menjelaskan bahwa pemetaan wilayah pesisir sangat penting untuk menentukan batas wilayah HGB dan melindungi kawasan perikanan.

"Dengan menggunakan alat GPS, kita bisa memastikan lokasi dan luas wilayah HGB secara akurat. Ini akan membantu dalam proses pemberian HGB dan mencegah konflik lahan," ujarnya.

Acara ditutup dengan sesi tanya-jawab dan pembagian brosur informasi tentang HGB pesisir.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Segenap Pimpinan dan Anggota
DPRD KABUPATEN SIDOARJO

Mengucapkan



**SELAMAT
HARI JADI
KABUPATEN
SIDOARJO**



Sidoarjo Baik, Hebat, dan Bermartabat



H. Abdillah Nasih
Ketua DPRD
Kabupaten Sidoarjo

Suyarno, SH, MH
Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Sidoarjo

H. Kayan, SH
Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Sidoarjo

Warih Andono, SH
Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Sidoarjo

Jawa Pos



Selamat & Sukses

**HUT KABUPATEN SIDOARJO KE-166
DAN HUT RADAR SIDOARJO KE-16**



**Sidoarjo
Hebat, Baik
Dan Bermartabat**

DAN



**RADAR
SIDOARJO**

31 Januari 2009 - 31 Januari 2025

WARIH ANDONO, S.H

WAKIL KETUA DPRD KAB. SIDOARJO

Scanned with CamScanner



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



**Sidoarjo
Hebat, Baik
Dan Bermartabat**



**10TH
RADAR
SIDOARJO**

Semangat Bersinergi

31 Januari

RADAR SIDOARJO | JUMAT, 31 JANUARI 2025 |



**DPD PARTAI AMANAT NASIONAL
KABUPATEN SIDOARJO**

MENGUCAPKAN

Selamat & Sukses

**HUT KABUPATEN SIDOARJO KE-166
DAN HUT RADAR SIDOARJO KE-16**



DAN



**10TH
RADAR
SIDOARJO**

31 Januari 2025 - 31 Januari 2025



**H. Haris
Bendahara**

**Dr. Emir Firdaus, ST, MM
Ketua**

**Bangun Winarso
Sekretaris**



PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI D DPRD KABUPATEN SIDOARJO

MENGUGAPKAN

Selamat dan Sukses

HUT KABUPATEN SIDOARJO KE-166

DAN

HUT RADAR SIDOARJO KE-16

166 Sidoarjo
Hebat, Baik
Dan Bermartabat
1959 - 2025
Sidoarjo

DAN



**RADAR
SIDOARJO**

31 Januari 2009 - 31 Januari 2025







INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

HGB PAGAR LAUT, KEJAGUNG DALAMI DUGAAN SUAP PEGAWAI ATR/BPN

Pagar Laut Sidoarjo Disebut Lebih Luas dari Tangerang

Selain Sertifikat Laut, Ada Hutan Bersertifikat Hak Milik

Jakarta-HARIAN BANGSA

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenhum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar mengatakan akan memantau informasi pencopotan enam pegawai kementerian ATR/BPN yang diduga terlibat HGB pagar laut untuk melihat ada tidaknya indikasi suap. Siregar kaitan konteksnya ada apakah jalan tol, misalnya, dalam konteks pemalsuan, atau tidak profesional dalam menjalankan

❖ Bersambung ke Hal. 11



Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan sejumlah pejabat mengikuti Raker dengan Komisi II DPR, di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

HARIAN
BANGSA
Koran Warga Jatim

Pagar Laut...

Sambungan dari halaman 1

jabatannya, apakah ada suap, dan seterusnya. Nah ini nanti yang kita lihat," jelasnya saat ditemui di Kompleks Kejaksaan, Jakarta, Kamis (30/1).

Ia menyebut Kejaksaan akan proaktif melakukan pengamatan soal suap terkait masalah pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Institusi kejaksaan sampai sejauh ini mendahulukan kerja-kerja yang dilakukan institusi terkait, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun Kementerian ATR/BPN.

Menurut Harli, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidus) bakal turut mengusut dugaan korupsi jika Kementerian KP dan Kementerian ATR/BPN menemukan indikasi dugaan pidana.

"Kalau misalnya terindikasi ada tindak pidana korupsi, katakanlah dalam penerbitannya dan seterusnya, ada suap gratifikasi, nah tentu ini menjadi kewenangan kami," kata Harli.

Nusron mengaku sudah mencopot enam pegawai Kementerian ATR/BPN akibat pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Dugaan korupsi di balik pemasangan pagar laut itu juga dilaporkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman ke Kejaksaan.

Dalam aduannya, Boyamin turut melaporkan oknum ATR/BPN di Kabupaten Tangerang yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di perairan yang dipatok pagar laut. Selain itu, Boyamin mengadukan sejumlah kepala desa, aparatur kecamatan maupun kabupaten di Kabupaten Tangerang.

"Karena berkaitan nampaknya dengan perda yang disambung-sambungkan, ada Perda Nomor 13/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang. Yang laut itu kan seakan-akan akan dibuat lahan pemukiman atau apa, itu disambung-sambungkan," tandasnya.

Boyamin mengungkapkan bahwa proses penyelidikan dugaan kasus itu sudah dilakukan oleh jajaran JAM-Pidus, sehingga laporan darinya dapat memperkuat penyelidikan tersebut. Dalam hal ini, JAM-Pidus turut meninjau bukti berupa salinan

akta jual beli.

"Terbitnya sertifikat di atas laut itu saya meyakini palsu, karena tidak mungkin bisa diterbitkan karena itu di tahun 2023. Kalau ada dasar klaim tahun 80-an, 70-an, empang dan lahan. Artinya, itu sudah musnah, sudah tidak bisa diterbitkan sertifikat," kata Boyamin, kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

Boyamin menuturkan penerbitan SHGB berujung pemasangan pagar laut itu melanggar Pasal 9 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Boyamin mengatakan apabila menelisik ke belakang, semua diduga berawal dari informasi adanya reklamasi pada 2012.

"2012 itu kemudian ada sumbu ada reklamasi dan sebagainya. Kemudian, warga banyak yang membeli segel tahun 80-an ke kantor pos Teluknaga dan ke Jakarta," tutur Boyamin.

Boyamin melaporkan sejumlah kepala desa, yakni di Desa Kohod, Kronjo, Tanjung Kait, dan Pulau Cangkir, yang diduga ikut mengurus SHM dan SHGB sejak 2012.

Boyamin berharap proses pengusutan kasus dugaan korupsi ini juga mengarah kepada Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Tipikor. Dia membeberkan berdasar keterangan warga setempat bahwa pihak Kejaksaan sudah mencari sejumlah data terkait ke lokasi yang diharapkan bisa mempercepat proses hukum tersebut.

Sementara Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid blak-blakan soal pagar laut di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Nusron mengungkapkan ada sertifikat hak guna usaha (HGU) di pagar laut Sidoarjo atas nama tiga perusahaan. Dia merinci PT Surya Inti Permata memiliki 285 hektare, PT Semeru Cemerlang memiliki 152 hektare, PT Surya Inti Permata memiliki 219 hektare.

"Kalau ditotal 656,8 hektare, lebih besar daripada Tanggulang, jadi ini persoalan yang harus didengar pendapat dengan Komisi

II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/1).

Nusron menjelaskan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di pagar laut di Tangerang berluas 390,8 hektare. Lalu pagar laut yang bersertifikat hak milik (SHM) seluas 22,9 hektare.

Kementerian ATR/BPN, kata Nusron, sudah mengecek keabsahan sertifikat-sertifikat di pagar laut Sidoarjo. Menurutnya, sebagian besar di antaranya akan dicabut karena tak sesuai perundang-undangan.

"Kalau menggunakan ketentuan fakta materilnya ini masuk kategori tanah musnah sudah bisa dibatalkan yang (area) satu dan dua. Yang (area) tiga masih ada tanahnya," ujarnya.

Laporan tentang pagar laut misterius bermunculan di sejumlah daerah. Hal itu terjadi usai nelayan berteriak lahan pencariannya terganggu pagar 30 kilometer di laut Kabupaten Tangerang.

Usai kejadian itu, pemerintah pusat turun tangan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar itu. Pembongkaran pun dilakukan setelah ada instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Setelah itu, Kementerian ATR/BPN mencabut sertifikat-sertifikat yang tak sesuai perundang-undangan.

Selain sertifikat laut, Nusron juga mengakui ada sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna usaha (SHGU) di atas lahan hutan.

"Ada satu perusahaan atau tanah yang sudah disertifikatkan dalam bentuk SHM atau SHGU. Dalam perjalanan tiba-tiba muncul itu masuk kawasan hutan. Sebaliknya, ada juga yang petanya hutan, tapi petugas kita menerbitkan sertifikat," kata Nusron.

Namun, Nusron enggan mengungkapkan berapa banyak SHM atau SHGU di atas lahan hutan begitupun perusahaan mana saja yang memiliki lahan-lahan di kawasan hutan tersebut.

Oleh karenanya, Kementerian ATR/BPN telah membuat kesepakatan dengan Kementerian Kehutanan.

"Kalau ada hutan dulu, baru

ada SHGU atau SHM, maka akan kita menangkan hutannya. Maka kewajiban ATR/BPN adalah membatalkan sertifikatnya. Sebaliknya kalau ada sertifikat HGU dulu atau HGB, atau hak milik dulu, baru tiba-tiba muncul ada peta hutan, maka kesepakatannya Kementerian Kehutanan wajib menghapus itu dari peta hutan," ujarnya.

Informasi yang dikutip dari RMOL, mengungkap salah satu perusahaan di Bali yakni PT Bali Turtle Island Development (BTID) ingin menyerobot kawasan hutan.

Saat ini, perusahaan tersebut tengah mengajukan permohonan ke UPT Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Kota Denpasar. PT BTID dalam permohonannya agar hutan lindung yang juga merupakan kawasan suci karena terdapat beberapa Pura besar di dalamnya itu dikelola oleh mereka.

Kepala UPT Tahura Ngurah Rai, Ketut Subandi membenarkan hal tersebut saat dikonfirmasi. Bahwa permohonan tersebut sedang berproses di Kementerian Kehutanan.

"Ya benar, sudah berproses di Kementerian Kehutanan, sesuai peraturan," ujar Subandi melalui pesan singkat WhatsApp.

PT BTID saat ini tengah disorot, selain ingin mengelola hutan, perusahaan tersebut juga diprotes lantaran dianggap telah mengelola wilayah perairan di Serangan.

Anggota DPR RI dapil Bali, Nyoman Parta menegaskan bahwa PT BTID tidak berhak mengelola wilayah perairan di Serangan.

Aturan tersebut mengacu pada Pasa 27 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang menyatakan bahwa laut itu sepanjang 12 mil dikuasai oleh pemerintah Provinsi.

"Jadi mohon maaf, BTID tidak bisa kelola laut. Apalagi melarang orang datang ke laut, sama sekali tidak bisa lakukan itu," tegas Parta dalam pertemuan bersama pihak BTID, Kamis (30/1/2025). (rmol/rol/tic/lan)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



BPN Pastikan Tidak Ada Perpanjangan HGB di Laut Sidoarjo

SIDOARJO – Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sidoarjo mendatangi kantor ATR/BPN Sidoarjo kemarin (30/1) pagi. Mereka berunjuk rasa terkait adanya wilayah HGB di laut Desa Segoro Tambak, Sedati.

Warga meminta agar HGB seluas 656 hektare yang berada di kawasan perairan tidak diperpanjang. "Kami meminta BPN untuk tidak memperpanjang atau menyetujui perpanjangan HGB di wilayah tersebut," ujar Korlap Aksi Nanang Romi.

Masyarakat tidak ingin wilayah perairan yang seharusnya bebas diakses justru jatuh ke tangan perusahaan besar. Menurutnya, jika HGB diperpanjang, nelayan akan semakin terpinggirkan dan akses ke laut akan terganggu.

Menanggapi tuntutan warga, Kepala ATR/BPN Sidoarjo Moh. Rizal memastikan bahwa tidak akan ada perpanjangan HGB di kawasan perairan tersebut. Bahkan, berdasar aturan yang berlaku, lahan tersebut sudah termasuk tanah musnah.

Menurut dia, menteri ATR/BPN sudah menyampaikan dua mekanisme yang akan ditempuh. Pertama, HGB itu akan habis pada 2026 dan tidak akan diperpanjang. "Kedua, berdasar UU No 5 Tahun 1960 Pasal 40, salah satu alasan hapusnya HGB adalah jika tanahnya musnah. Dan, saat ini lahan tersebut sudah berubah menjadi laut akibat abrasi," jelasnya.

Rizal menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada pihak yang mengajukan perpanjangan HGB. (eza/fal)



Komisi B DPRD Sidoarjo Angkat Bicara Terkait Sengketa Parkir Yang Bisa Berdampak Pada Sektor PAD

Sidoarjo, Jaya Pos

Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo menegaskan bahwa target pendapatan senilai 25 miliar dari pengelolaan parkir memang telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, target tersebut bisa tercapai manakala hasil sidang sengketa perdata antara Dinas Perhubungan dengan PT Indonesia Sarana Servis dimenangkan oleh Dinas Perhubungan selaku kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Sullamul Hadi Nurmawan, Sekretaris Komisi B mengatakan, ada dua kemungkinan hasil dari sidang perdata di Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut, diantaranya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dinahkodai oleh Dinas Perhubungan telah memenangi sengketa tersebut maka Dinas Perhubungan kiranya wajib untuk bisa mencapai target yang maksimal sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. "Tinggal menjalankan saja kiranya apa yang sudah menjadi ketentuan," terangnya.

Lalu selanjutnya, bila mana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kalah dalam proses persidangan tersebut maka PT Indonesia Sarana Service berhak untuk meneruskan kerja sama dengan Dinas Perhubungan, yang dikhawatirkan adalah, bila mana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berhasil memenangkan persidangan tersebut namun masih belum ada target atau opsi-opsi tertentu di



Komisi B DPRD Sidoarjo Angkat Bicara

dalam pelaksanaan guna mencapai target yang telah dituntukan, dan akhirnya sektor Pendapatan Asli Daerah akan mengalami kerugian lantaran targetnya yang tidak bisa terpenuhi dari sektor parkir.

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Sidoarjo bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menetapkan target berat ditengah sengketa pengelolaan parkir dengan PT ISS, sementara Dinas Perhubungan telah ditargetkan untuk mampu meraup PAD senilai 25 miliar dari sektor parkir.

Sengketa antara PT Indonesia Sarana Servis-Kerja Sama Operasional hingga kini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Sidoarjo, berlangsung empat kali

dilakukan mediasi namun berakhir tanpa hasil.

Sementara pada sidang dihari Selasa 14 Januari 2025 lalu juga gagal lantaran pembacaan materi gugatan batal.

Dinas Perhubungan saat itu hadir namun dari PT ISS-KSO tidak hadir tanpa alasan dan penjelasan hingga akhirnya majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut menyatakan akan memanggil PT ISS-KSO agar hadir pada sidang hari Selasa 21 Januari 2025.

Kepala Dinas Perhubungan, Benny Airlangga saat keluar dari Ruang Sidang Tirta Pengadilan Negeri Sidoarjo, Selasa 21 Januari 2025. "Sidang ditunda," ujarnya.

(Ad)

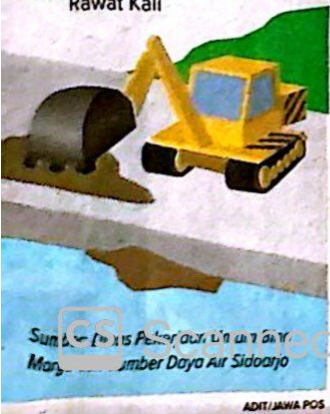
HUT Sidoarjo dan Tantangan Bupati-Wakil Bupati Terpilih

Mendekatkan Layanan, Mengurai Problem Tahunan

Berbagai layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan menjadi perhatian Subandi dan Mimik Idayana yang akan dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Sidoarjo. Tapi, mereka juga dihadapkan pada problem tahunan yang belum terpecahkan.

SOLUSI MENGATASI BANJIR

- ✓ Pembangunan infrastruktur pengendali banjir
- ✓ Peninggian jalan dan bangunan
- ✓ Pengaktifan 36 rumah pompa, ditambah rumah pompa baru di Kramat Jegu, Tambak Sawah, dan Banjarpanji
- ✓ Pembangunan kisdam darurat di Krian dan Taman
- ✓ Normalisasi sungai
- ✓ Penertiban lapak liar
- ✓ Program Jihad Rawat Kali

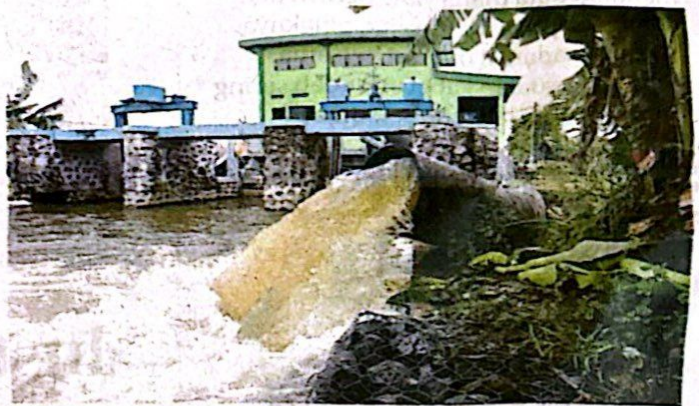


HAMPIR setiap tahun, SDN Kedungbanteng dan SMPN 2 Tanggulangin terendam banjir. Posisi yang dekat muara laut membuat Sidoarjo kerap terdampak pasang air laut (rob). Belum lagi, di area tersebut ada penurunan tanah beberapa sentimeter tiap tahun. Jika air laut pasang dan intensitas hujan tinggi, sudah pasti banjir.

Meski banjir, bukan berarti tidak ada upaya penanganan. Halaman dan bangunan SMPN 2 Tanggulangin pernah ditinggikan. Jalan di depan dua sekolah tersebut juga ditinggikan 40 sentimeter dengan beton.

Pemkab Sidoarjo juga sudah membangun enam rumah pompa di sana. Tersebar di Banjarpanji, Kedungbanteng, dan sekitarnya. "Ditambah pompa mobile dan portabel, total pompa yang beroperasi 32 unit, aktif semuanya," kata Camat Tanggulangin Sabino Mariano.

Tahun ini bahkan akan ditambah rumah pompa lagi di dekat Jembatan Kedungpeluk untuk estafet pembuangan air dari Kedungbanteng. Pembangunan kisdam darurat juga dilakukan.



ALIRKAN AIR: Rumah pompa di Kedungbanteng berperan penting mengatasi banjir di kawasan Tanggulangin.

Di wilayah utara, kondisinya serupa. Sering banjir. Terutama yang dekat dengan aliran Sungai Buntung. Mulai dari Krian, Taman, Waru, bahkan sampai Sedati.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan, pihaknya membangun tiga kisdam darurat di Krian dan Taman. "Semuanya dilengkapi dengan pompa kekuatan masing-masing 400 liter per detik," kata Dwi.

Solusi untuk di area Waru dan Sedati seperti di Desa Tropodo dan Tambak Sawah yang sering banjir, Pemkab Sidoarjo terus menyiagakan pompa. Sudah ada enam rumah pompa di sana. Paling banyak di Tambak Sawah dengan empat rumah pompa.

Di Waru dan Tropodo masing-masing satu rumah pompa di area Tropodo. "Total ada 36 rumah pompa di Sidoarjo, aktif semuanya," jelasnya.

Penanganan pembersihan sungai tidak terlewatkan. Puluhan kilometer sungai sudah dinormalisasi.

Plt Bupati Sidoarjo Subandi menginisiasi gerakan jihad rawat kali. Menurut dia, penanganan banjir menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Seluruh ASN diajak terjun bersama bersih-bersih. Minimal seminggu dua kali.

Subandi menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa parsial. Pihaknya pun berkoordinasi lintas instansi seperti dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. (uzi/c6/fal)

Jawa Pos





Siswa DKV SMK Krian dalam workshop pembuatan film.

Siswa SMK Krian Berworkshop Pembuatan Film

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

54 siswa dari jurusan Desain Komunikasi Visual (DKV) SMK Pemuda Krian, mengikuti workshop bertajuk “Pembuatan Film: Dasar Kreativitas di Dunia Visual”, Kamis (30/01/2025). Acara ini diselenggarakan dalam rangka Program Guru Tamu dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), dengan menghadirkan Moch. Syahrul Rizal, S.I.Kom., seorang profesional di bidang komunikasi dan perfilman sebagai pemateri.

Workshop bertujuan memberikan pengetahuan dasar tentang pembuatan film, mulai dari konsep cerita hingga teknik pengambilan gambar. Di awal sesi, Rizal menekankan pentingnya fotografi sebagai dasar bagi seorang pembuat film. Ia juga mendorong siswa untuk terus memperkaya literasi dan mengamati lingkungan sosial sekitar sebagai sumber inspirasi cerita.

“Film yang baik berawal dari cerita yang kuat. Untuk itu, banyak membaca dan mengamati kehidupan sekitar sangat penting bagi calon pembuat film,” ujar Rizal.

Materi selanjutnya, membahas teknik-teknik dalam produksi film, seperti penggunaan kamera, pencahayaan, dan audio. Siswa diajarkan cara mengatur angle kamera yang sesuai, teknik komposisi gambar, serta berbagai gerakan kamera untuk menciptakan efek dinamis. Beberapa teknik dasar yang dipelajari yang pertama adalah angle kamera eye level, low angle, dan high angle untuk menciptakan kesan yang berbeda pada penonton, kedua belajar Komposisi Gambar menggunakan rule of thirds, leading lines, dan golden ratio agar gambar terlihat lebih menarik. Ketiga adalah belajar gerakan Kamera Teknik seperti panning, tilting, tracking, dan zooming untuk memberikan dinamika pada adegan.

Selain teori, siswa juga diajak praktik langsung mengoperasikan kamera untuk memahami pengaturan fokus,



pencahayaannya, serta sudut dan gerakan kamera. (cat/rus)



RADAR
SIDOARJO.ID



Pendemo di depan kantor pertanahan Sidoarjo.

GPS Demo soal HGB Pesisir Segorotambak

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Aksi demo yang digelar Gerakan Pemuda Sidoarjo (GPS) menuntut kejelasan terkait Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah pesisir Desa Segorotambak, Kecamatan Sedati, mendapat tanggapan langsung Kepala Kantor Pertanahan Sidoarjo, Muh Rizal.

Dengan sikap tegas dan terbuka, ia menemui para pendemo dan mengundang mereka masuk ke dalam kantor untuk menyampaikan aspirasinya.

Muh Rizal menjelaskan, aspirasi yang disampaikan terkait dengan HGB di laut Sidoarjo, sudah mendapatkan tanggapan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia.

Ia menyampaikan bahwa terdapat dua mekanisme yang harus ditempuh terkait HGB di lautan yang saat ini telah berubah menjadi wilayah perairan akibat abrasi.

"Jangka waktu HGB di wilayah

tersebut akan berakhir pada tahun 2026 dan tidak akan diperpanjang. Yang kedua, itu sudah tanah musnah," jelasnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Pasal 40, salah satu alasan dihapusnya HGB adalah jika tanah tersebut musnah, dan saat ini area tersebut sudah menjadi laut.

Ia juga menegaskan, wilayah tersebut awalnya merupakan tambak yang terkena abrasi sehingga tanahnya hilang dan berubah menjadi lautan. Investigasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tanah tersebut telah hilang karena abrasi, selain itu haknya berakhir pada tahun 2026.

"Sekarang di sana tidak ada apa-apa, tidak ada pemagaran, nelayan bebas lalu lalang tanpa gangguan. Jadi, tidak mungkin ada usulan perpanjangan HGB, apalagi tanah tersebut telah tercatat sebagai lautan," tuturnya.

Diketahui, ada tiga HGB di tanah seluas 656 hektare tersebut. Masa

berlaku tanah tersebut selama 30 tahun, yang mana HGB nomor tiga dan empat akan berakhir pada 2026. Sedangkan HGB nomor lima akan berakhir pada 2029.

Korlap Aksi Gerakan Pemuda Sidoarjo (GPS), Nanang Rimi, menyoroti kasus HGB seluas 656 hektare yang kini menjadi lautan dan dikuasai oleh beberapa korporasi. Menurutnya, hal tersebut sangat merugikan masyarakat, terutama nelayan di wilayah tersebut. "Kita sudah ditemui Kepala BPN Sidoarjo, Pak Rizal. Alhamdulillah, beliau sangat terbuka dan dinamis. Kita patut mengapresiasi sikap beliau," katanya.

Ia menegaskan, seharusnya tidak ada korporasi yang menguasai lahan yang kini sudah menjadi lautan. Menurutnya, praktik ini merupakan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan masyarakat. Ia juga menyoroti adanya dugaan bahwa SHGB atas lautan tersebut dijadikan agunan di bank diduga milik pemerintah. (cat/rus)



LOETIYUDITA

UMKM HKTI Sidoarjo cooking demo di Aula Kecamatan Tanggulangin Kamis (30/1/25)

Cooking Demo Tingkatkan Perekonomian Lokal

SIDOARJO - Upaya meningkatkan perekonomian salah satunya dengan usaha/dagang untuk warga. Seperti yang dilakukan UMKM HKTI (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Sidoarjo dengan berbagai pelatihan dan cooking di Aula Kecamatan Tanggulangin Kamis (30/1/25).

Endang Prasetyowati, Ketua UMKM HKTI Sidoarjo mengatakan bahwa kali ini UMKM HKTI menggelar acara cooking demo bersama Fibercreme serta didukung oleh para sponsor yang selalu mendukung acara HKTI.

"Adapun sponsor yang turut mendukung antara lain Zaitun, Samhap, Medena Lux, Mie Padamu, UBM, Cheers, OMG, Tupperware, Sanex, BRI, dan FIF. Peserta yang hadir diperkirakan sekitar 60 orang," jelas Endang.

Endang menambahkan "Kami juga berusaha memberikan tempat bagi UMKM untuk menjual produk mereka di setiap event yang diadakan oleh HKTI. Selain cooking demo, HKTI juga memberikan banyak solusi, termasuk pelatihan-pelatihan yang bekerja sama dengan dinas terkait," tambahnya.

“Harapan kami bisa terus berkolaborasi dengan masyarakat, terutama di bidang memasak masakan tradisional maupun olahan minuman yang bisa dijadikan ide usaha di wilayah Kecamatan Tanggulangin khususnya,” tutup Endang. Terpisah, Bintang Bagus Hermawan, Technical Chef Fibercreme dari PT. Lautan Natural Krimerindo, mengatakan cooking demo bersama Fibercreme dan UMKM HKTI di Sidoarjo merupakan kesempatan yang sangat berharga.

“Hari ini kami bersyukur karena bisa dipertemukan dalam acara ini dalam keadaan sehat wal afiat. Saya juga senang dapat berbagi ilmu memasak dan berbagai macam olahan yang menggunakan Fibercreme,” ujar Chef Bintang, yang biasa disapa demikian.

Chef Bintang berharap agar lebih banyak peserta UMKM yang dapat bergabung di acara seperti ini untuk lebih memeriahkan suasana. “Saya berharap anggota-anggota HKTI di Sidoarjo dapat terus membangun wadah bagi teman-teman UMKM yang sedang merintis usahanya, sehingga mereka bisa lebih maju dan sukses di tahun 2025,” pungkasnya.

Sementara itu, Indra Partnership Account Officer Finatra Surabaya (FIF Group), mengatakan, sejak 2022, FIF meluncurkan program baru bernama Finatra, yang khusus ditujukan untuk mendukung para pelaku UMKM melalui pemberian modal usaha. Salah satunya adalah HKTI, yang beberapa kali mengadakan acara bekerja sama dengan FIF. ●Loe



Plt Bupati Sidoarjo Subandi dalam sidak RTLH di rumah warga di Kecamatan Sidoarjo

Plt Bupati Tinjau Kondisi Memprihatinkan RTLH Warga

SIDOARJO - Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo, Plt Bupati Sidoarjo Subandi respon cepat terhadap laporan Masyarakat. Yakni langsung melakukan sidak Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Jati Kecamatan Sidoarjo, di Rumah Amiruddin (39) Rabu (29/1/25) kemarin.

Dengan didampingi Kapolres Sidoarjo, Kepala Dinas Sosial, Camat Sidoarjo, Baznas, dan Kepala Desa Jati, Subandi memastikan kondisi RTLH tersebut layak untuk mendapatkan bantuan.

Rumah Amir, kondisinya sangat memprihatinkan. Tembok rumah banyak yang mengelupas, atap sebagian dari asbes yang kayu penyangga sudah lapuk. Lantai rumah hanya sebagian yang menggunakan ubin. Rumah ini tidak memiliki kamar mandi dan jamban, selama ini numpang di rumah saudaranya.

Selain itu, plafon rumah yang terbuat dari anyaman bambu sudah

rusak parah. Kondisi ini semakin memburuk saat musim hujan, dimana banyak bagian atap dan plafon yang bocor.

Melihat kondisi tersebut, Plt Bupati Subandi langsung menginstruksikan kepada baznas untuk segera memproses bantuan agar segera dilakukan perbaikan.

"Kondisi rumah seperti ini tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Pemerintah daerah bersama Baznas akan terus turun ke lapangan untuk mengidentifikasi rumah-rumah yang tidak layak huni dan memberikan bantuan perbaikan. Ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, terutama untuk warga yang tidak mampu," ujar Subandi Kamis (30/1/25).

Ia juga menegaskan pentingnya perhatian terhadap kondisi RTLH demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.

perbaikan RTLH, kualitas hidup warga dapat meningkat, yang pada gilirannya akan menciptakan stabilitas sosial di wilayah ini," ujar Subandi

Sementara itu, Kepala Desa Jati, menambahkan bahwa pihaknya siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan Baznas untuk mengupayakan perbaikan rumah Amir, serta memastikan warga lain yang memiliki nasib serupa dapat memperoleh perhatian yang sama.

Amir Ruddin, mengaku yang tinggal bersama anak istrinya, sangat bersyukur, Dimana kunjungan kepala daerah ke rumahnya membawa kabar untuk memberikan bantuan rehab rumahnya. Sudah lama Amir berniat merenovasi rumahnya, namun tidak punya biaya.

"Saya juga mengucapkan terima kasih, karena sertifikat rumah saya sudah lama hilang, mau gurus tidak ada biaya, ini malah dapat dibantu ngurus lewat program PTSL," ucapnya



KOMITMEN: Plt Bupati Sidoarjo Subandi saat menandatangani Pakta Integritas dengan OPD Pemkab Sidoarjo.

Perkuat Kinerja OPD Melalui Pakta Integritas, Plt Bupati Gas Pol untuk Perubahan Lebih Baik

KOTA-Plt Bupati Sidoarjo Subandi gas pol. Orang nomor satu di Sidoarjo itu terus berupaya meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan menandatangani Pakta Integritas.

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat komitmen lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Plt Bupati Sidoarjo Subandi, menegaskan penting-

nya kebersamaan dalam mewujudkan perubahan di Kabupaten Sidoarjo.

"Alhamdulillah, kami ingin ada perubahan yang lebih baik. Karena itu, hari ini saya turun langsung untuk mengajak seluruh OPD membangun kebersamaan," ujarnya, Kamis (30/1).

Menurut Subandi, Pakta Integritas ini bertujuan memperkuat sinergi antar-OPD dalam menjalankan

tugas dan tanggung jawab mereka. Ia menekankan bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) akan terus memantau pelaksanaan setiap program OPD guna memastikan efektivitasnya.

"Kinerja OPD akan terus kami pantau agar kebersamaan ini benar-benar menjadi penguat dalam pelaksanaan program pembangunan di Sidoarjo," katanya.

Subandi juga menyebut

bahwa beberapa kecamatan telah mendapatkan penilaian baik atas kinerjanya. Sementara bagi kecamatan yang belum mencapai standar yang diharapkan, Pemkab akan melakukan evaluasi dan pendampingan.

"Harapan kami, melalui Pakta Integritas ini, setiap OPD memiliki rasa tanggung jawab yang lebih tinggi dalam menjalankan tugasnya. Ada mekanisme monito-

ring, dan jika tidak dijalankan dengan baik, tentu ada sanksinya," jelasnya.

Dengan mekanisme ini, ia berharap kedisiplinan dan tanggung jawab OPD semakin meningkat sehingga mereka bisa bekerja lebih maksimal dalam melayani masyarakat. "Arah kami jelas, yakni membangun kebersamaan dan mendorong kemajuan Kabupaten Sidoarjo," pungkasnya. (sai/vga)

HARI JADI KE-166

JUMAT 31 JANUARI 2018

**BANGUN
KEBER-
SAMAAN:**
Plt Bupati
Sidoarjo
Subandi
(kanan)
memimpin
penanda-
tanganan
pakta
integritas
di Pendopo
Delta Wibawa
kemarin (30/1).



FIRMA ZUHDA JAWA POS

Teken Pakta Integritas, OPD Bakal Rutin Dievaluasi

Plt Bupati: Lebih Solid dan Berikan Pelayanan Terbaik

SIDOARJO – Kinerja organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sidoarjo akan lebih terkontrol. Itu seiring dengan adanya perjanjian kinerja dan pakta integritas.

Kemarin (30/1), kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Sidoarjo diminta menandatangani perjanjian kinerja dan pakta integritas di Pendopo Delta Wibawa. Mereka diminta untuk terus bisa meningkatkan kinerja dalam pemerintahan dan pelayanan publik. Jika

“ Kami sudah instruksikan ke Sekda untuk terus melakukan monitoring.”

SUBANDI

Plt bupati Sidoarjo

Pelayanan Publik Kinerja Perangkat Daerah. Penghargaan SAKIP antara lain diberikan kepada RSUD RT Notopuro Sidoarjo dengan predikat AA. Lalu, Kecamatan Jabon dan predikat BB ke A, Kecamatan Sedati dari predikat BB ke A, dan Dinas Komunikasi dan Informatika dari predikat BB ke A. (uzi/fal)

dalam pemerintahan dan pelayanan publik. Kinerja menurun, mereka akan dievaluasi.

Satu per satu kepala OPD tanda tangan dengan disaksikan Plt Bupati Sidoarjo Subandi. "Kami sudah instruksikan ke Sekda untuk terus melakukan monitoring," kata Subandi.

Menurut dia, pada awal 2025 ini harus ada komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja. Setelah menandatangani pakta integritas, tugas-tugas OPD bakal lebih terkontrol. "Dan akan rutin dievaluasi. Tentu ada sanksinya jika tidak memenuhi target," tegas Subandi.

Prinsipnya, lanjut dia, perjanjian kinerja itu untuk membangun kebersamaan dan kesejahteraan di Sidoarjo. Antar OPD agar lebih solid dan memberikan pelayanan terbaik. Evaluasi bakal dilakukan rutin sesuai bidangnya.

Selain perjanjian kinerja, Plt Bupati Sidoarjo Subandi juga memberikan penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) dan indeks

Jawa Pos

UMKM HKTI Sidoarjo



LOKET/DATA

UMKM HKTI Sidoarjo cooking demo di Aula Kecamatan Tanggulangin
Kamis (30/1/25)

Cooking Demo Tingkatkan Perekonomian Lokal

SIDOARJO - Upaya meningkatkan perekonomian salah satunya dengan usaha/dagang untuk warga. Seperti yang dilakukan **UMKM HKTI** (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Sidoarjo dengan berbagai pelatihan dan cooking di Aula Kecamatan Tanggulangin Kamis (30/1/25).

Endang Prasetiyowati, Ketua **UMKM HKTI** Sidoarjo mengatakan bahwa kali ini **UMKM**

HKTI menggelar acara cooking demo bersama Fibercreme serta didukung oleh para sponsor yang selalu mendukung acara HKTI.

"Adapun sponsor yang turut mendukung antara lain Zaitun, Samhap, Medena Lux, Mie Padamu, UBM, Cheers, OMG, Tupperware, Sanex, BRI, dan FIF. Peserta yang hadir diperkirakan sekitar 60 orang," jelas Endang.

Endang menambahkan "Kami juga berusaha memberikan tempat bagi UMKM untuk menjual produk mereka di setiap event yang diadakan oleh HKTI. Selain cooking demo, HKTI juga memberikan banyak solusi, termasuk pelatihan-pelatihan yang bekerja sama dengan dinas terkait," tambahnya.

"Harapan kami bisa terus berkolaborasi dengan masyarakat, terutama di bidang memasak masakan tradisional maupun olahan minuman yang bisa dijadikan ide usaha di wilayah Kecamatan Tanggulangin khususnya," tutup Endang. Terpisah, Bintang Bagus Hermawan, Technical Chef Fibercreme dari PT. Lautan Natural Krimerindo, mengatakan cooking demo bersama Fibercreme dan UMKM HKTI di Sidoarjo merupakan kesempatan yang sangat berharga.

"Hari ini kami bersyukur karena bisa dipertemukan dalam acara ini dalam keadaan sehat wal afiat. Saya juga senang dapat berbagi ilmu memasak dan berbagai macam olahan yang menggunakan Fibercreme," ujar Chef Bintang, yang biasa disapa demikian.

Chef Bintang berharap agar lebih banyak peserta UMKM yang dapat bergabung di acara seperti ini untuk lebih memeriahkan suasana. "Saya berharap anggota-anggota HKTI di Sidoarjo dapat terus membangun wadah bagi teman-teman UMKM yang sedang merintis usahanya, sehingga mereka bisa lebih maju dan sukses di tahun 2025," pungkasnya.

Sementara itu, Indra Partnership Account Officer Finatra Surabaya (FIF Group), mengatakan, sejak 2022, FIF meluncurkan program baru bernama Finatra, yang khusus ditujukan untuk mendukung para pelaku UMKM melalui salah satunya adalah



Scanned with CamScanner

pemberian modal usaha. Salah satunya adalah HKTI, yang beberapa kali mengadakan acara bekerja sama dengan FIF. ● **Loe**

DUTA



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tambah RSUD untuk Wilayah Timur dan Utara

TAHUN ini Pemkab Sidoarjo akan mengupayakan pemerataan pelayanan kesehatan di tingkat fasilitas kesehatan (faskes) lanjutan. Salah satunya dengan membangun rumah sakit umum daerah (RSUD) di Sedati.

Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo dr Lakshmi Herawati Yuwantina mengungkapkan, proses RSUD Sedati masih dalam tahapan pemilihan manajemen konstruksi (MK). "Sampai sekarang masih proses pemilihan MK, bisa direalisasikan di PSE," katanya.

RSUD Sedati diharapkan

bisa mulai dibangun tahun ini. "Ini rencana besar Pemkab Sidoarjo untuk menyediakan fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang merata," katanya.

Pembangunan RSUD Sedati akan menggunakan anggaran sebesar Rp 60 miliar yang berasal dari APBD. RSUD Sedati akan menjadi faskes tingkat lanjut untuk wilayah timur dan utara Sidoarjo. "Nantinya kemungkinan akan melayani masyarakat di wilayah Gempal, Sukedono, Wungu, dan Sedati," jelasnya. Itu merupakan langkah penting

untuk memastikan semua warga Sidoarjo memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan.

Lakshmi mengungkapkan, RSUD itu akan menempati lahan eks Puskesmas Sedati lama. Selain memberikan kemudahan akses, kehadiran RSUD Sedati diharapkan dapat mengurangi beban dari RSUD RT Notopuro dan RSUD Sidoarjo Barat (Sibar).

Sementara itu, sejak naik kelas menjadi rumah sakit tipe A, RSUD RT Notopuro terus berubah. Kebetulan akan fasilitas medis yang lebih modern dan terpadu

semakin mendesak untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Delta.

Gedung diagnostik terpadu (GDT), salah satu layanan baru yang segera diluncurkan, telah selesai bangunan fisiknya. Plt Direktur RSUD RT Notopuro dr Atok Irawan menuturkan, GDT menjadi bagian dari upaya rumah sakit dalam memenuhi standar layanan tipe A. Dengan ketersediaan fasilitas laboratorium diagnostik yang lengkap, GDT RSUD RT Notopuro akan lebih siap untuk memperluas kapasitas IGD. (ezn/Ed)



SEGERA BEROPERASI: Plt Direktur RSUD RT Notopuro dr Atok Irawan di depan gedung diagnostik terpadu.

Jawa Pos

Sekolah Rusak Diidentifikasi dengan Aplikasi

INFRASTRUKTUR bidang pendidikan juga menjadi salah satu prioritas Pemkab Sidoarjo. Ratusan sekolah rusak akan diperbaiki tahun ini.

Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan, Sarana dan Prasarana Dinas Dikbud Sidoarjo Indar Hidayanti mengatakan, sebanyak 78 SDN dan 33 SMPN bakal diperbaiki tahun ini. "Ini sudah mulai proses lelang pelaksanaannya," kata Indar.

Selain yang terjadwal tersebut, pihaknya juga menyiapkan anggaran untuk sekolah yang rusak insidental. Misalnya, ketika terdampak puting beliung, banjir, atau roboh mendadak. Sekolah tersebut diperbaiki melalui anggaran belanja tidak terduga (BTT).

Termasuk dalam perubahan anggaran keuangan (PAK), pihaknya memastikan akan menambah jumlah

sekolah yang diperbaiki. "Ini masih proses pengusulan dana BTT. Untuk PAK bisa jadi akan kami usulkan pula dari hasil analisis kembali data-data dan laporan kerusakan sekolah," katanya.

Pihaknya terus mengidentifikasi sekolah-sekolah rusak yang ada di Kota Delta. Ada aplikasi khusus yang sudah disiapkan. Kepala sekolah bisa mengunggah kondisi sekolah dalam aplikasi tersebut, berikut



Penanganan banjir menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah."

SUBANDI

Plt bupati Sidoarjo

dengan detail titik lokasi dan jenis kerusakan.

Pihaknya akan meninjau dan memetakan mana yang akan diprioritaskan untuk diperbaiki. "Selain lewat aplikasi, surat usulan dari sekolah langsung juga kami tindak lanjuti. Sekolah bisa menyampaikan usulan," katanya.

Selain perbaikan sekolah rusak, Pemkab Sidoarjo melanjutkan penuntasan pembangunan dua sekolah baru di Sidoarjo. Yakni, di SMPN 2 Prambon dan SMPN 2 Tulangan.

Plt Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan bahwa pihaknya memastikan layanan pendidikan optimal. "Infrastrukturnya harus baik. Targetnya 70 persen dari sekolah rusak bisa tuntas tahun ini," katanya. (uzi/fal)

TETENGER: Monumen Jayandaru di Alun-Alun Sidoarjo. Memasuki usia 166 tahun, Sidoarjo semakin penting sebagai kota penyangga bagi Surabaya.



Monumen Jayandaru



ANGGER BONDAN/JAWA POS